

Judul : Reformasi Penegak Hukum Mendesak
Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

INDEKS NEGARA HUKUM

Reformasi Penegak Hukum Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi institusi penegak hukum dan membuka ruang bagi kebebasan sipil menjadi agenda mendesak untuk meningkatkan indeks negara hukum Indonesia di masa mendatang. Meskipun tidak gampang, dua pekerjaan rumah itu bisa menghasilkan kondisi lebih baik.

Sebelumnya, World Justice Project (WJP) mengungkapkan bahwa indeks negara hukum Indonesia turun satu poin dari 0,53 pada 2024 menjadi 0,52 pada tahun ini. Peringkat RI pun turun, semula ke-68 dari 143 negara menjadi ke-69 dari 143 negara.

Ada tiga subfaktor/indikator yang menyumbang turunnya skor indeks negara hukum RI pada tahun ini, yaitu melemahnya pembatasan kekuasaan pemerintah di antaranya oleh legislatif dan yudikatif, menurunnya pemenuhan hak-hak fundamental, serta peradilan pidana yang masih bermasalah.

Menyikapi hal itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, berpandangan, ada dua cara untuk meningkatkan indeks negara hukum RI. Pertama, menjamin ruang kebebasan sipil sebagai penyeimbang kekuasaan karena tidak berfungsinya oposisi. Kedua, agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di institusi penegakan hukum.

Salah satu penyakit yang belum dapat diatasi hingga kini, menurut dia, adalah persoalan ketidakpastian hukum. Hal ini imbas dari permasalahan korupsi di bidang penegakan hukum atau *judicial corruption*. Ada ketidakpastian hukum karena hukum bisa diperdagangkan.

"Hukum menjadi tidak bisa diprediksi, *unpredictable*, karena bisa dibeli," katanya, Kamis (30/10/2025). Oleh karena itu, ia menambahkan, reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum menjadi agenda yang mendesak untuk dilakukan.

Ia menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang ingin membentuk tim reformasi Polri. Namun, realisasinya masih tertunda hingga sekarang.

"Semakin ditunda, semakin kita berada di situasi yang korup dalam penegakan hukum kita. Jadi, sekali lagi, memang dunia penegakan hukum menjadi masalah besar di berbagai indeks kita," ujar Zaenur.

Buka ruang kebebasan sipil

Salah satu penyumbang penurunan indeks negara hukum RI adalah pada indikator pembatasan kekuasaan eksekutif oleh legislatif yang melemah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya skor pada subfaktor atau permasalahan ini, yaitu 0,66 pada 2022 dan 2023 menjadi 0,62 pada tahun ini.

WJP juga mencatat penurunan skor di subfaktor/bidang pemenuhan hak-hak fundamental (hak asasi manusia) dari 0,49 pada tahun sebelumnya menjadi 0,47 pada tahun ini. Pada aspek ini, penurunan skor juga tampak pada aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi (dari 0,62 pada 2024 menjadi 0,59 pada tahun ini). Padahal, kebebasan berekspresi itu seharusnya dijamin secara efektif.

Menurut Zaenur, hal tersebut terlihat jelas dalam berbagai kebijakan negara yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil untuk mencurahkan pendapatnya. Ini setidaknya tampak ketika pemerintah menangani aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu hingga awal September lalu.

Selain itu, menurut dia, pemerintah yang berkuasa sekarang ini juga kehilangan oposisi. Yang terjadi kemudian, tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lailo, menghargai penilaian terhadap indeks negara hukum tersebut. Hasil itu menjadi bahan evaluasi dan mekanisme kontrol dari publik terhadap kinerja negara.

"Ini bagian dari mekanisme kontrol yang juga menjadi vitamin buat kita. Kalau dinilai buruk, mari diperbaiki. Kalau sudah baik, mari semakin diperbaiki," katanya. (ANA)